
**DAMPAK PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020
TERHADAP SOSIAL EKONOMI PEDAGANG DI PASAR MARON KABUPATEN
PROBOLINGGO**

Oleh

Imam Sucahyo¹, Husni Mubaroq², Muh. Sunil Rizaldi³

Universitas Panca Marga Probolinggo, Jawa Timur-Indonesia

E-mail: ³icalrizaldi64@gmail.com

Article History:

Received: 04-11-2022

Revised: 19-12-2022

Accepted: 24-12-2022

Keywords:

Dampak Peraturan
Pemerintah, Sosial
Ekonomi, Pedagang,
Pasar Maron
Kabupaten
Probolinggo

Abstract: Pandemi covid-19 merupakan puncak perubahan terjadinya tatanan kehidupan masyarakat yang memaksa masyarakat untuk terus melakukan perubahan dalam setiap kegiatan. Banyak masyarakat terdampak dengan adanya kebijakan-kebijakan mengenai pandemi covid-19 salah satu peraturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia yang memiliki dampak cukup besar terhadap masyarakat adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Penelitian ini mencoba menganalisis peraturan tersebut dari sudut pandang dampak negatif dan positif terhadap sosial ekonomi pedagang di Pasar Maron Kabupaten Probolinggo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Informan kunci dalam penelitian ini adalah pedagang pasar. penelitian ini lebih fokus pada jawaban pedagang mengenai dampak penerapan PSBB terhadap sosial ekonomi pedagang di pasar Maron Kabupaten Probolinggo. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pandangan pedagang yang kebanyakan berfikir positif terhadap penerapan PSBB. Walaupun tidak semua pedagang menerapkan PSBB sesuai yang diputuskan oleh pemerintah. Penerapan tersebut sangat bermanfaat karena mengurangi penularan penyakit covid-19 yang ada dimasyarakat.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah merubah tatanan peradaban kehidupan sosial manusia. "Perubahan tersebut terlihat pada perubahan pola perilaku manusia itu sendiri, ketika mereka melakukan suatu aktivitas yang tidak biasanya mereka lakukan tetapi sudah menjadi hal yang biasa dilakukakan, maka hal tersebut akan menjadi suatu kebiasaan yang baru dalam kehidupan mereka. Begitu juga, akibat pandemi ini terjadi perubahan sosial yang tidak direncanakan dan tidak dikehendaki oleh seluruh masyarakat karena menyebabkan disorganisasi disegala bidang kehidupan manusia. prospek pertumbuhan ekonomi dunia dan Indonesia 2020 yang berpotensi lebih rendah apabila wabah Covid-19 makin menyebar sehingga memicu penerapan kebijakan restriksi atau social distancing yang lebih ketat oleh berbagai negara, dan tekanan pasar keuangan global berlanjut akibat ketidakpastian yang tinggi (Michael, 2020).

Perkembangan kasus COVID-19 di Jawa Timur memperlihatkan sebuah kemajuan yang sangat pesat. Bahkan, meskipun beberapa waktu kasus COVID-19 ini sempat memudar, tetap saja penambahan kasus tetap terjadi. Akibat adanya pandemi COVID-19 ini, tentunya banyak membawa dampak atau pengaruh. Dampak-dampak ini pun berputar di beberapa sektor kehidupan masyarakat. Baik di sektor ekonomi, politik, hingga sosial. Untuk sektor sosial ditandai dengan adanya perubahan sosial bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Baik itu terhadap perilaku sosial masyarakat, misalnya saja yang selalu bersama-sama dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Karena kurangnya interaksi dan sosialisasi masyarakat akibat pemberlakuan social/physical distancing, hingga kondisi sosial masyarakat yang hampir terpuruk akibat dampak PHK karena pembatasan sosial, hingga penurunan pendapatan masyarakat. Dampak sosial yang dihadapi oleh masyarakat pun tidak terlepas dari dampak sosial ekonomi yang kemudian muncul dan bahkan menjadi salah satu fokus perhatian paling penting.

Banyak masyarakat yang harus kehilangan pekerjaan. Baik karena dilakukan PHK oleh perusahaan, atau karena tidak mendapatkan pemasukan bagi para pelaku usaha atau UKM. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar bukan hanya berpengaruh pada masalah sosial di Indonesia, namun juga merambah pada masalah-masalah lain yang diakibatkan oleh pemberlakuan kebijakan tersebut. Dari segi sosialnya, tentu sudah jelas bahwa setiap masyarakat dan antar pihak lain jadi dibatasi proses sosialisasinya, baik antar sesama keluarga, sesama teman, dan masyarakat lainnya. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dari itu penulis tertarik membahas mengenai *"Dampak peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 terhadap sosial ekonomi pedagang di Pasar Maron Kabupaten Probolinggo"*.

LANDASAN TEORI

a. Kebijakan Publik

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Menurut Soetopo kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau Negara yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai nilai tertentu dan praktek-praktek tertentu. Agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan (Soetopo, 2005:10).

b. Dampak

Dampak adalah suatu akibat yang dihasilkan dari pengimplememntasian sebuah kebijakan atau program. Dampak dari kebijakat atau program terdapat pada bagian evaluasi yang menempati posisi terakhir dalam alur proses kebijakan publik, setelah formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan atau program. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pasti akan menimbulkan dampak, baik dampak positif yaitu dampak yang diharapkan dapat membawa perubahan dan manfaat yang berguna bagi sasaran kebijakan, maupun dampak negatif yang tidak diharapkan terjadi. Dampak sendiri berarti, pengaruh yang timbul dari suatu kebijakan/program yang terjadi dalam masyarakat.

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia benturan, pengaruh yang

mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. (KBBI Online,2010)

c. Konsep Kondisi Sosial Ekonomi

a. Kondisi Sosial

Menurut Alwi, Hasan (2007) Kondisi sosial Masyarakat diartikan sebagai pengembangan masyarakat. Jadi kondisi sosial yaitu suatu keadaan yang berkaitan dengan atau situasi dalam masyarakat tertentu yang berhubungan dengan keadaan sosial. Menurut Linton (2003) dan Basrowi dan Juariyah (2010) kondisi sosial masyarakat dapat dilihat dari 5 indikator yaitu umur, jenis kelamin, pekerjaan, keluarga, *prestise*, dan keanggotaan dalam kelompok. Dari kelima indikator tersebut hanya indikator umur dan jenis kelamin yang mempengaruhi oleh proses pendidikan sehingga tinggal empat indikator yang perlu diukur tingkat perbaikannya, guna mengetahui tingginya manfaat sosial bagi Masyarakat.

b. Kondisi Ekonomi

Menurut Robinson (2009) Bahwa kondisi ekonomi adalah suatu keadaan yang secara rasional dan menetapkan seseorang dalam posisi tertentu dalam masyarakat, hal ini menyangkut pendapatan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya pemberian posisi itu disertai pula dengan seperangkat hal dan kewajiban yang harus di mainkan oleh si pembawa status. Kedudukan ekonomi seseorang juga di tentukan oleh pekerjaannya, dengan pekerjaannya seseorang akan mendapatkan penghasilan atau pendapatan yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhannya hidupnya seperti sandang, pangan, dan papan.

c. Kondisi sosial ekonomi

Menurut Sastro Pratja (2002) dalam Basrowi dan Juariyah (2010), kondisi sosial ekonomi adalah keadaan atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Kondisi ekonomi sosial masyarakat cukup beragam dan kompleks, terutama dalam kualitas lingkungan permukiman dan aspek kesehatan yang di hadapi, dan hal ini jelas berkaitan pula dengan dimensi ekonomi mereka, sebab ada keterkaitan secara langsung antara kemampuan pemenuhan kebutuhan dengan upaya – upaya perbaikan kualitas hidupnya. Pada masyarakat miskin dengan tingkat pendapatan yang sangat tidak mencukupi cenderung hidup seadanya saja, hal ini ikut pula menggambarkan pada pola – pola permukiman mereka yang kumuh, semraut yang justru memiliki umpan balik pada derajat kesehatan. Sebagai lingkaran kemiskinan yang sulit di atasi lagi, apalagi di tambah dengan pertumbuhan penduduk yang semakin padat.

d. Pasar

Dalam ilmu ekonomi pengertian pasar tidak harus dikaitkan dengan suatu tempat yang dinamakan pasar dalam pengertian sehari- hari. Suatu pasar dalam ilmu ekonomi adalah dimana saja terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Dalam teori ekonomi mikro pasar meliputi juga pertemuan antara pembeli dan penjual dimana antarkeduanya saling bertransaksi. Sedangkan menurut Hendri Ma`ruf mendefinisikan bahwa kata pasar memiliki tiga pengertian, yaitu pasar dalam arti “tempat”, yaitu tempat bertemunya para penjual atau produsen dengan pembeli atau konsumen. Pasar dalam arti “interaksi permintaan dan penawaran”, yaitu pasar sebagai tempat terjadinya interaksi jual beli.

Pasar tradisional adalah sebuah tempat terbuka yang terjadi proses transaksi jual beli

dengan proses tawar-menawar, di pasar tradisional ini para pengunjung tidak selalu menjadi pembeli karena dia juga bisa menjadi penjual. Kasmir mendefinisikan pasar tradisional adalah sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pasar diartikan sebagai suatu mekanisme yang terjadi antara pembeli dan penjual atau tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran.

Pasar tradisional tersebar baik di kota maupun di desa memiliki ciri-ciri khas dalam proses jual-beli, tidak hanya sebagai tempat bertemunya hubungan personal, tempat sumber informasi, dan merupakan sarana penting bagi daya dukung perekonomian kota maupun desa. Pasar tradisional sangat penting bagi kehidupan masyarakat karena tempat untuk membeli kebutuhan sehari-hari, barang yang diperjual belikan adalah kebutuhan pokok. Bangunan pasar tradisional biasanya berupa kios-kios, gerai dan dasaran terbuka yang dibuka oleh pemiliknya sendiri.

METODE PENELITIAN

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data yang telah diperoleh adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan kepada pedagang pasar yang dianggap dapat menjawab pertanyaan sesuai relevansi penelitian dan bisa memberikan gambaran yang berfokus pada jawaban pedagang mengenai dampak penerapan PSBB terhadap sosial ekonomi pedagang di pasar Maron Kabupaten Probolinggo. Sumber data dalam penelitian adalah bersumber dari sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu informasi mengenai dampak Peraturan Pemerintah RI No 21 Tahun 2020 terhadap sosial ekonomi pedagang di pasar Maron Kabupaten Probolinggo. Data yang kedua adalah data sekunder, data ini merupakan data primer yang telah diolah oleh pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain yang pada umumnya disajikan dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekilas yang dapat ditangkap dari peneliti bahwasanya banyak hal yang disampaikan dari informan terkait dampak secara ekonomi yang membuat pedagang semakin mengeluh terhadap adanya peraturan PSBB. Ekonomi yang sebelumnya stabil sebelum adanya penerapan peraturan ini dan kemudian berubah drastis ketika diterapkan peraturan PSBB, sehingga masyarakat sekitar maron sulit beradaptasi dengan keadaan yang serba diatur atau dibatasi. Bukan hanya dari sector ekonomi saja yang membuat masyarakat sekitar maron merasa tidak nyaman dengan adanya peraturan yang diterapkan oleh pemerintah. Tetapi aspek social pun terdampak, dimana masyarakat maron yang sebelumnya terlihat harmonis antara satu dengan yang lainnya kini mereka seakan enggan untuk berinteraksi dan hal ini bukan karena hubungan emosional mereka renggang tetapi karena adanya peraturan yang ditegakkan untuk menyukseskan program pemerintah, maka mau tidak mau masyarakat harus menjaga kontak fisik dan mengurangi berinteraksi dengan yang lainnya. Tetapi dalam hal ini kebijakan yang pemerintah ambil dalam bentuk sebuah peraturan, pada dasarnya bertujuan baik untuk meminimalisir penyebaran covid-9 yang akan berakibat kematian terhadap masyarakat di sekitar desa maron.

Dalam hal ini terdapat variable, sub variable dan beberapa indicator yang digunakan

untuk melakukan penelitian diantaranya adalah dalam aspek dampak negatif dan positif yang memiliki indikator pandangan dan pendapatan pedagang pasar Maron Kabupaten Probolinggo. Setelah diterapkannya peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pendapatan pedagang pasar Maron Kabupaten Probolinggo menurun drastis. Adanya peraturan tersebut sangat berpengaruh terhadap permintaan barang maupun jasa khususnya dibidang pasar tradisional. Pelaku usaha pada pedagang mikro khususnya pada pasar tradisional yang biasanya bisa memiliki pendapatan yang tinggi, setelah kemunculan peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pendapatan pedagang menurun drastis. Hal ini diakibatkan oleh permintaan di pasar yang menurun. Adapun penjelasan dari setiap indikator dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Dampak Positif

Dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. Positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif daripada kegiatan menjemukan, kegembiraan daripada kesedihan, optimisme daripada pesimisme. Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan fokus mental seseorang pada negative. Jadi, dapat disimpulkan pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi, atau memberi kesan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik. Dalam hal ini dampak positif memiliki beberapa indikator yang berdampak pada sosial ekonomi pedagang di saat penerapan PSBB, meliputi :

1. Pandangan

Pandangan masyarakat khususnya pedagang di pasar maron terhadap penerapan PSBB. Selama pandemi pandangan masyarakat merasakan sesuai atau tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Untuk mendapatkan gambaran bagaimana pandangan masyarakat khususnya pedagang terhadap positifnya penerapan PSBB itu sendiri. Bahwa penerapan PSBB sesuai dalam pandangan pedagang khususnya pedagang kecil, dikarenakan ada dampak positif yang dirasakan oleh pedagang disaat penerapan PSBB tersebut dan pandangan pedagang sesuai dengan harapannya.

2. Pendapatan

Pendapatan diperoleh dari pedagang yang bekerja guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Selama pandemi pendapatan yang diperoleh ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Hal itu terjadi karena penerapan PSBB yang mengakibatkan minimnya daya beli masyarakat yang datang untuk sekedar melihat atau membeli dagangan mereka.

bahwa penerapan PSBB sesuai dalam pendapatan pedagang khususnya pedagang koveksi, dikarenakan ada dampak positif yang dirasakan oleh pedagang disaat penerapan PSBB tersebut dan walau pendapatan pedagang masih sama saja seperti sebelum adanya penerapan PSBB.

b. Dampak Negatif

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, dampak negatif adalah pengaruh kuat yang

mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya.

Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

1. Pandangan

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan PSBB tidak sesuai dalam pandangan pedagang khususnya pedagang kecil, dikarenakan ada dampak Negatif yang dirasakan oleh pedagang disaat penerapan PSBB tersebut dan pandangan pedagang tidak sesuai dengan harapannya.

2. Pendapatan

Penerapan PSBB tidak sesuai dalam pendapatan pedagang khususnya pedagang Aksesoris, dikarenakan ada dampak Negatif yang dirasakan oleh pedagang disaat penerapan PSBB tersebut dan pendapatan pedagang tidak sesuai dengan harapannya.

Kebijakan PSBB dalam masa pandemi ini juga menyebabkan terjadinya perubahan sosial yang terlihat dalam bentuk perubahan interaksi sosial pedagang yang mana mencakup segala aktivitas-aktivitas mereka dalam berdagang. Terjadinya perubahan ini mengakibatkan terganggunya proses interaksi yang berlangsung diantara masyarakat khususnya para pedagang dan pembeli. Dimana, mereka tidak leluasa dalam berkomunikasi dan melakukan kontak secara langsung antar individunya. Hal tersebut merupakan salah satu akibat dari adanya aturan social distancing yang diberlakukan dalam Kebijakan PSBB oleh pemerintah.

Sedangkan dalam segi aktivitas ekonomi, Kebijakan PSBB dalam masa pandemi menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang dialami oleh pedagang. Hal tersebut terlihat pada aktivitas pedagang dalam melakukan kegiatan berdagangnya. Dimana, terjadi perubahan pada proses interaksi mereka dalam upaya melayani pembeli, perubahan dalam rutinitas berdagang dan persaingan dagangnya.

KESIMPULAN

Dari hasil observasi yang dilakukan, pendapatan yang diperoleh tidak sesuai harapan masyarakat. Hal itu terjadi karena minimnya daya beli, adanya penerapan PSBB dimasyarakat dan pada saat itu pembeli juga dalam masa sulit. Pendapatan yang diperoleh pun tidak sama seperti sebelumnya sebelum pandemi berlangsung. Melalui observasi kita dapat melihat sebagian masyarakat merasa pendapatan berkurang sebelum penerapan. Hal itu membuat pedagang berfikir untuk mencukupi kebutuhan hidupnya walaupun penghasilan yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan. Maka dari itu sebagian masyarakat mengeluh karena tidak dapat bekerja seperti sebelum penerapan karena bingung dari penerapan mendapatkan pendapatan yang tidak sesuai yang diharapkan selama ini. Selama penerapan PSBB pendapatan masyarakat banyak yang berfikir negatif terhadap kurangnya penerapan dari petugas pasar. Hanya sebagian yang menerapkan dikarenakan banyaknya

pembeli yang menyesuaikan jam kerja di pasar. Sehingga menyulitkan pedagang untuk menerapkan PSBB yang dapat informasi dari petugas pasar.

Adapun beberapa saran yang direkomendasikan peneliti diantaranya adalah Bagi pemerintah, harus lebih banyak memberikan penjelasan tentang arti penerapan PSBB dan memberikan solusi agar masyarakat bisa membeli dagangan pedagang agar pedagang bisa menjual dagangannya dengan sesuai harapannya. Bagi pedagang dan masyarakat, harus bisa menerapkan PSBB dengan baik agar pelaksanaan jual beli dipasar berjalan lancar dan sesuai harapan yang diinginkan.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Abdul Wahab, Solichin, Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 20012
- [2] A., Morissan M. dkk.2017. Metode Penelitian Survei. Jakarta: Kencana.
- [3] Arikunto, S. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara
- [4] ANALISIS DAMPAK COVID-19 TERHADAP SOSIAL EKONOMI PEDAGANG DI PASAR KLATEN DAN WONOGIRI | AZIMAH | EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial. (n.d.). Retrieved July 23, 2022, from <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/empati/article/view/16485>
- [5] ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PEMBATASAN WAKTU OPERASIONAL PASAR DI KABUPATEN MINAHASA AKIBAT PENANGGULANGAN COVID-19 | Sidik | JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan). (n.d.). Retrieved July 23, 2022, from <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/1160/1085>
- [6] AZIMAH, R. N., KHASANAH, I. N., PRATAMA, R., AZIZAH, Z., FEBRIANTORO, W., & PURNOMO, S. R. S. (2020). ANALISIS DAMPAK COVID-19 TERHADAP SOSIAL EKONOMI PEDAGANG DI PASAR KLATEN DAN WONOGIRI. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 9(1), 59–68. <https://doi.org/10.15408/empati.v9i1.16485>
- [7] Herispon, H. (2020). DAMPAK EKONOMI PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR TERHADAP MASYARAKAT KOTA PEKANBARU DI PROVINSI RIAU. *Eko Dan Bisnis: Riau Economic and Business Review*, 11(2), 164–173. <https://doi.org/10.36975/jeb.v11i2.269>
- [8] Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- [9] Nasruddin, R., & Haq, I. (2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 7(7), 639–648. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15569>
- [10] Pratama, S., Kismartini, K., & Rahman, A. Z. (2021). Dampak Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Ekonomi Pelaku Usaha di Pasar Tanah Abang Jakarta. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(4), 59–78. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v10i4.32034>
- [11] Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali
- [12] Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Pedoman Pembatasan Sosial

Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

- [13] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)